

GAMBARAN PENYEBAB KEKOSONGAN OBAT DAN UPAYA PENGENDALIANNYA DI GUDANG OBAT IFRS RSUD KRATON TAHUN 2019

Diana Lestari¹⁾, ST.Rahmatullah²⁾, Fitriyani³⁾

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

e-mail: dianalestriathoillah@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan Kefarmasian merupakan salah satu pelayanan yang sangat penting di suatu rumah sakit, salah satunya dalam melakukan ketersediaan obat. Pengelolaan persediaan obat yang kurang baik dapat berakibat pada jumlah stok obat yang tersedia, hal ini akan berakibat menurunkan kualitas dari rumah sakit dan menurunkan pendapatan dari rumah sakit, selain itu dapat berakibat pada tingkat kualitas hidup pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyebab kekosongan obat dan untuk mengetahui upaya pengendalian di RSUD Kraton Tahun 2019. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan wawancara secara mendalam berdasarkan teknik *purposive sampling*. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan obat yaitu waktu tunggu obat yang berbeda-beda, kekosongan dari distributor. Upaya pengendalian dilakukan stok opnam 1 bulan sekali.

Kata Kunci: Obat, Kekosongan, Pengendalian.

ABSTRACT

Pharmaceutical service is one of the most important services in a hospital, on which is the availability of drugs. Poor management of drug supplies can result in the number of available stock of drugs, this will result in lowering the quality of the hospital and lowering income from the hospital, besides it can have an impact on the quality of life of patients. The purpose of this study was to describe the causes of drug vacancies and to determine control efforts at the Kraton Hospital in 2019. This research method is descriptive sampling and document review technique. The factors that led to drug vacancies were the waiting time for different drugs, vacancies from distributors. Efforts to control opnam stock are carried out once a month.

Keywords: Medicine, Drug vacancy, Control.

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI,

2016). Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan salah satu unit dalam rumah sakit dalam menyelenggarakan seluruh dilakukannya pekerjaan kefarmasian (Rusly, 2016). Tujuan dari penelitian dilakukan untuk mengetahui penyebab

kekosongan obat dan upaya pengendaliannya yang dilakukan di RSUD Kraton pada Tahun 2019.

Dalam melakukan manajemen persediaan dalam rumah sakit mempunyai arti sangat penting dalam menjamin ketersediaan obat merupakan tuntutan yang harus dimiliki dalam melakukan pelayanan kesehatan. Tahapan dari manajemen persediaan yaitu melakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, evaluasi dan monitoring. Dalam melakukan manajemen persediaan harus dilakukan secara koordinasi agar menghindari terjadinya suatu efek yang tidak baik secara medis dan ekonomis (Guswani dkk, 2018).

. Terjadinya stok obat yang kosong dapat mengakibatkan nilai kerugian yang lumayan besar pada rumah sakit. Nilai kerugian ini disebabkan karena system manajemen persediaan obat belum cukup baik Menurut penelitian dari Hadidah & Rochmah (2016) tentang *Faktor Penyebab Kejadian Stagnant Dan Stokout Di Instalasi Farmasi UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur*. Dari data tersebut menunjukkan terjadi *Stock out* obat sebanyak 29% hal ini dikarenakan manajemen persediaan obat belum berjalan dengan baik. Selain itu akibat adanya kekosongan obat dapat mengakibatkan

dapat berpengaruh pada mutu pelayanan kepada pasien, perawatan tertunda dan keluhan pasien.

Kekurangan perawatan pada pasien ini disebabkan karena dalam pemberian obat yang tidak maksimal akan berpengaruh pada efek yang diberikan pada proses perawatan kepada pasien (Winasari, 2015).

Pengelolaan persediaan obat yang kurang baik akan menurunkan kualitas dari rumah sakit itu sendiri dan menurunkan pendapatan dari rumah sakit, selain itu dapat berakibat pada tingkat kesehatan pasien. Berdasarkan pernyataan dari Ka.Instalasi Farmasi RSUD Kraton pada tahun 2019 terjadi kekosongan obat sebanyak 132 jenis obat yang dilakukan pembelian secara *cito*

A. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Gambaran Penyebab Kekosongan Obat Dan Upaya Pengendaliannya Di Gudang Obat RSUD Kraton Tahun 2019” merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik Pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dengan informan (data primer) dan telaah dokumen (data sekunder). Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Agustus- Bulan Oktober Tahun 2020 di Gudang obat IFRS, depo rawat jalan dan rawat inap RSUD Kraton. Teknik sampling menggunakan *Nonprobability*

Sampling yaitu terdapat peluang untuk seseorang/benda menjadi sampel (Andarusito, 2015). Sedangkan teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yang berdasarkan atas kriteria inklusi dan eksklusi (Sugiyono, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah 35 orang terdiri dari 14 Apoteker dan 21 Tenaga Teknis Kefarmasian diambil dari data bulan januari- juli tahun 2020 di RSUD Kraton. Informan yang terdiri dari 7 yaitu Ka.Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Kepala Devisi Logistik Farmasi, TTK Gudang obat IFRS 1 orang, Apoteker Penanggung jawab rawat inap dan rawat jalan masing-masing 1 orang, TTK rawat jalan dan rawat inap masing-masing 1 orang. Penelitian ini berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pertanyaan dari Fadhilia (2013) dan Winasari (2015) yang telah dimodifikasi dan merujuk pada referensi PERMENKES No.72 Tahun 2016 yang terkait dengan manajemen logistik rumah sakit. Validitas data pada penelitian menggunakan metode Trianggulasi sumber dan Trianggulasi metode. Pada penelitian Trianggulasi sumber menggunakan wawancara dari berbagai Informan sedangkan Trianggulasi metode. Analisis data yang dilakukan dari data yang didapatkan kemudian dikumpulkan menjadi satu dari berbagai informan, data kemudian dibuat transkrip wawancara,

kemudian data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian direduksi. Kemudian dari hasil data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Pekalongan, tingkat kemiskinan turun 3,1% dengan rata-rata sebesar 0,78% per tahun. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari sekitar 112 ribu orang pada tahun 2015, menjadi sekitar 87 ribu orang pada tahun 2019. Penurunan tingkat kemiskinan diiringi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,8% poin dan penurunan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,3% poin. Penurunan pada kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2019, penurunan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan diiringi dengan perbaikan kualitas ekonomi penduduk miskin.

Hasil estimasi ADePT menempatkan kelompok usia non produktif 0-14 tahun dan 60 tahun ke atas sebagai kelompok dengan tingkat kemiskinan terbesar serta memiliki share terbesar (42,7% - 50%) terhadap total penduduk miskin. Pada tahun 2019, lebih dari separuh rumah tangga miskin memiliki anggota rumah tangga sebanyak 5 orang atau lebih, dan hampir separuhnya (51,7%) memiliki 1 orang balita. Probability rumah tangga menjadi miskin dengan adanya perubahan

demografi (kelahiran) meningkat hampir dua kali lipat dari 66,0% hingga 88,4% di tahun 2015 menjadi 119% hingga 135% di tahun 2019.

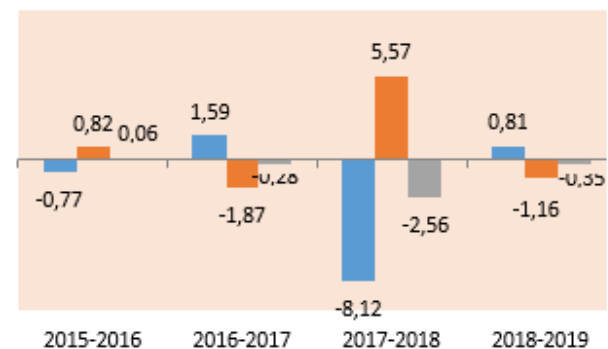
Tabel 1. Probabilitas Menjadi Miskin Karena Perubahan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga di Kabupaten Pekalongan, Tahun 2015 dan 2019

<i>Education of the household head</i>	2015	2019
SD Ke bawah	(base)	(base)
SMP Sederajat	-26.5 s/d -38.0	-30.2 s/d -63.3
SMA Sederajat	-61.0 s/d -74.8	-65.2 s/d -78.9
Perguruan Tinggi	-95.4 s/d -96.7	-98.1 s/d -98.4

Sumber: Output ADePT, diolah dari Susenas 2015 dan 2019

Penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan didominasi mereka yang berpendidikan setingkat SD ke bawah (80,4% di tahun 2019). Besarnya peluang rumah tangga untuk terlepas dari kemiskinan semakin besar jika terjadi perubahan pendidikan kepala rumah tangga, terutama dari SD ke bawah menjadi SMP/ sederajat yang peluangnya bisa meningkat dua kali lipat pada tahun 2019 dibanding tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.

Ada kecenderungan terjadi pergeseran lapangan usaha penduduk miskin dari sektor manufaktur meskipun masih mendominasi ke sektor jasa. Penduduk miskin yang bekerja di sektor manufaktur persentasenya menurun dari 26,6% (2015) menjadi 19% (2019), sementara penduduk miskin yang bekerja di sektor jasa justru meningkat hampir dua kali lipat dari 8,8% (2015) menjadi 15,9% (2019). Namun jika dilihat tingkat kemiskinan berdasarkan lapangan usaha, ada pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor pertanian. Tingkat kemiskinan di sektor pertanian bergerak dari 8,8% (2015) menjadi 13,4% (2018) sementara tingkat kemiskinan di sektor manufaktur turun dari 15,2% (2015) menjadi 8,2% (2019). Gini ratio yang menggambarkan ketimpangan pendapatan



mengalami fluktuasi sepanjang periode 2015- 2019, Sempat turun hingga 30,0 (2017) kemudian naik menjadi 33,8 (2018) dan kembali turun menjadi 30,6 (2019). Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita sebesar 1% pada tahun 2019 dapat menurunkan tingkat kemiskinan 3,18% dari

kondisi aktualnya, lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika terjadi inflasi sebesar 5%, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 11,5% atau berubah 18,2% dari kondisi aktual. Sementara jika terjadi deflasi 5%, tingkat kemiskinan hanya akan turun 16% menjadi 8,2%. Simulasi ini menunjukkan bahwa penduduk rentan miskin jauh lebih banyak dibandingkan penduduk yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan.

Hasil hitungan berdasarkan teknik dekomposisi Shapley (Gambar 1) di Kabupaten Pekalongan pada periode tahunan selama tahun 2015-2019 menunjukkan fakta adanya trade-off antara efek pertumbuhan dengan efek redistribusi dengan besaran yang hampir sama, akibatnya efek netto terhadap penurunan kemiskinan relatif kecil. Efek pertumbuhan bernilai negatif, yang berarti menurunkan kemiskinan, terjadi pada periode 2015-2016 dan 2017-2018. Pada periode 2016-2017 dan periode 2018-2019 justru efek redistribusi yang memberi efek menurunkan kemiskinan, sedangkan efek pertumbuhan justru berpotensi meningkatkan kemiskinan.

Gambar 1. Efek Pertumbuhan dan Efek Redistribusi, 2015-2019

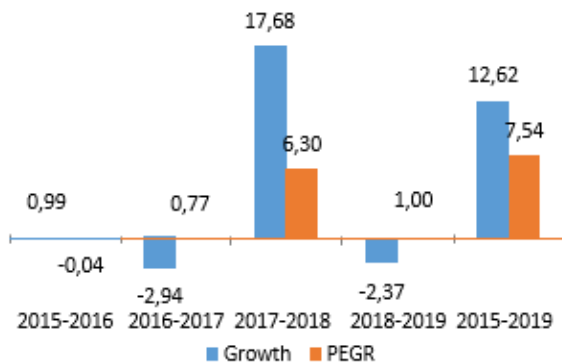
*Sumber: Output DASP, diolah dari
Susenas 2015-2019*

Pertumbuhan konsumsi per kapita selama periode 2015-2019 secara proporsional selayaknya dapat menurunkan kemiskinan sebesar - 4,86% jika tidak terjadi perubahan distribusi pendapatan.

Efek redistribusi menunjukkan adanya ketimpangan yang berpotensi meningkatkan kemiskinan sebesar 1,36%. Akibatnya selama 5 tahun tingkat kemiskinan hanya turun sebesar -3,13%. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara baik, ketimpangan pendapatan yang terjadi menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan. Pola pertumbuhan pada periode ini oleh Kakwani disebut sebagai “*trickle down*”, pembangunan memberikan efek menetas ke bawah yang lambat karena adanya ketimpangan. PEGR positif, namun masih jauh lebih rendah dari pertumbuhan riilnya. Perekonomian tumbuh 12,62%, sementara PEGR hanya sebesar 7,54%.

Pada periode 2015-2016 konsumsi per kapita masyarakat secara riil tumbuh 0,99%, namun kemiskinan justru meningkat ditandai dengan nilai negatif PEGR meskipun hanya sebesar -0.04%. Manfaat pertumbuhan ekonomi disinyalir hanya dinikmati oleh kelompok penduduk tidak miskin yang memicu terjadinya ketimpangan. Perekonomian tumbuh namun kemiskinan juga meningkat pola

pertumbuhan seperti ini disebut oleh Bhagwati (1988) sebagai “*immiserizing growth*”. Pada periode 2016-2017 pola pertumbuhan berubah total menjadi “*strongly pro-poor*”. Secara rata-rata pendapatan penduduk mengalami penurunan namun pendapatan sebagian penduduk miskin justru mengalami perbaikan. Pola pertumbuhan “*strongly pro-poor*” juga terjadi di periode 2018-2019.



Gambar 2. *Growth dan Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) Kabupaten Pekalongan, 2015-2019*

Sumber: Susenas, diolah.

Laju penurunan kemiskinan terbesar terjadi di periode 2017- 2018, dimana konsumsi per kapita dapat tumbuh secara riil hingga 17,68% meskipun tidak terdistribusi dengan baik, ditandai naiknya gini ratio dari 30,0 menjadi 33,8 yang menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin melebar. Akibatnya manfaat dari

pertumbuhan ekonomi yang dirasakan penduduk miskin secara proporsional masih lebih rendah dari penduduk non miskin. Pola pertumbuhan di periode ini masih bersifat “*trickle down*”.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu beriringan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Relasi antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan tingkat kemiskinan bergantung pada kebijakan-kebijakan makro dan mikro yang pada gilirannya menentukan siapa yang menerima manfaat hasil pertumbuhan. Hasil analisis data Susenas 2015-2019 dengan metode dekomposisi *Shapley* menunjukkan adanya *trade-off* antara efek pertumbuhan dengan efek distribusi. Pertumbuhan cenderung disertai dengan ketimpangan yang menghambat efek penurunan kemiskinan. Hal ini menyebabkan dalam kurun 2015-2019, pertumbuhan di Kabupaten Pekalongan cenderung pada pola yang tidak *pro-poor* dan masih bersifat *trickle down*. Pola redistribusi mengarah pada kelompok non-miskin sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk miskin secara proporsional lebih sedikit dibanding penduduk yang tidak miskin.

Melihat situasi tersebut agenda penting ke depan untuk penurunantingkat kemiskinan adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan menjadikan pertumbuhan lebih inklusif. Kunci upaya tersebut paling tidak ada pada dua hal. Pertama penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Ini dapat dilakukan dengan mendorong revitalisasi industri manufaktur diiringi dengan program-program padat karya—khususnya di perdesaan untuk mengisi periode di luar masa tanam dan panen. Kedua, menguatkan dan meningkatkan program-program perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin. Program-program ini merupakan *safety net* bagi kelompok miskin dan rentan dalam menghadapiguncangan ekonomi, sekaligus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Araar, Abdelkrim dan Duclos, Jean- Yves. 2012. User Manual DASP Version 2.2. DASP: Distributive Analysis Stata Package. Université Laval. PEP. CIRPÉE dan World Bank.
- Badan Pusat Statistik, Beberapa Terbitan. Data dan Informasi Kemiskinan Buku 2: Kabupaten/kota, Jakarta.
- Bourguignon, F. 2004. *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. The World Bank, Washington, DC.
- Hajiji, Ajid. 2010. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Kemiskinan di Propinsi Riau”. Tesis. IE-IPB, Bogor.
- Haughton, J dan Khandker, S.R. 2009. Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan. Alih bahasa. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kakwani, N dan Pernia, Ernesto M. 2000. “*What is Pro Poor Growth?*”. Asian Development Review;18(1).
- Kakwani, N dan Son, H.H. 2006. “*Pro-poor Growth: The Asian Experience*”. Research Paper. UNU-WIDER, No.2006/56, Brasilia.
- Kakwani, N dan Son, H.H. 2008. “*Poverty Equivalent Growth Rate*”. Review of Income and Wealth; 54:643-655.
- Laksani, C.S. 2010. Analisis *Pro- Poor Growth* Di Indonesia Melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. [Tesis]. FE-UI, Jakarta.
- Lopez, J.H. 2011. “*Pro-poor Growth: a review of what we know (and of what we don’t)*”. The World Bank.

- Mar'atis, Atik. 2011. "*Pro-Poor Growth* Tingkat Provinsi Di Indonesia". Tesis. IE-IPB, Bogor.
- Ravallion, M. dan S. Chen. 2001. "*Measuring Pro-poor Growth*". *Economic Letters*;78(1):93-99.
- Son, H. H. 2007. "*Interrelationship between Growth, Inequality, dan Poverty: The Asian Experience*". *Asian Development Review*, Vol. 24, No. 2, pp. 37-63.
- Suparno. 2010. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan: Studi Pro Poor Growth Policy di Indonesia". Tesis. IE-IPB, Bogor.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wodon, Quentin. T. 1999. "*Between Group Inequality and Targeted Transfers*". *Policy Research Working Paper. The Wold Bank*.